

Optimalisasi Peran BAPPERIDA dalam Mengintegrasikan Riset dan Inovasi ke dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi

Oleh: Zaelani

Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sukabumi

e-mail: zaelani_se@yahoo.com

Corresponding author: zaelani_se@yahoo.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Informasi Artikel:

Terima: 10-08-2026

Revisi: 15-09-2026

Disetujui: 05-10-2026

Publish Online: 13-10-2026

Transformasi Bappeda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sukabumi menuntut penguatan tata kelola agar riset dan inovasi menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Makalah kebijakan ini bertujuan menganalisis kesenjangan integrasi hasil riset ke dalam siklus perencanaan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang operasional. Analisis dilakukan melalui *Qualitative Gap Analysis* dan *Process Capability Assessment* dengan menelaah aspek kelembagaan, prosedur, koordinasi, integrasi informasi, dan evaluasi kinerja. Hasil analisis mengidentifikasi dua akar masalah utama. Pertama, hasil riset dan inovasi, termasuk riset klaster kewilayahan, belum terlembaga secara sistematis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Kedua, evaluasi kinerja internal masih cenderung berorientasi administratif sehingga pemanfaatan rekomendasi penelitian dan tindak lanjut perbaikan program belum terlacak secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ketepatan prioritas pembangunan, khususnya dalam merespons perbedaan kebutuhan wilayah utara dan selatan Kabupaten Sukabumi. Artikel kebijakan ini merekomendasikan penguatan *evidence-based policy* melalui pelembagaan *research clearance* dan integrasi dashboard monitoring dan evaluasi kinerja internal. Rekomendasi tersebut diwujudkan melalui usulan model SI-Riset (Sistem Integrasi Riset dan Perencanaan Pembangunan Daerah), yang menghubungkan penelaahan bukti, penyusunan program, pemantauan kinerja, tindak lanjut rekomendasi, dan pembelajaran kebijakan. Implementasi direncanakan secara bertahap selama 12 bulan, meliputi penyusunan SOP dan pembentukan tim lintas fungsi, pengembangan prototipe dashboard serta uji coba, kemudian penguatan kapasitas aparatur dan perluasan penerapan berdasarkan hasil evaluasi. Keberhasilan kebijakan dinilai melalui keterlaksanaan prosedur, pemanfaatan rekomendasi riset, keterlaksanaan data, tindakan korektif, dan perbaikan perencanaan. Dengan pendekatan ini, BAPPERIDA diharapkan mampu memperkuat perencanaan berbasis bukti, akuntabilitas kinerja, dan responsivitas pembangunan daerah.

Kata kunci: BAPPERIDA, *evidence-based policy*, *research clearance*, SI-Riset, perencanaan pembangunan daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Isu

Kebijakan pembangunan daerah perlu disusun berdasarkan data, hasil penelitian, evaluasi program, dan pengalaman pelaksanaan kebijakan. Pendekatan *evidence-based policy* atau *evidence-informed policymaking* menempatkan bukti sebagai salah satu landasan penting dalam proses identifikasi masalah, penentuan prioritas, pemilihan alternatif kebijakan, dan evaluasi hasil pembangunan. Head (2008, 2016) menjelaskan bahwa penggunaan bukti dalam kebijakan publik tidak hanya bergantung pada hasil penelitian ilmiah, tetapi juga memerlukan pertimbangan pengalaman profesional, konteks kelembagaan, dan penilaian para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan berbasis bukti tidak cukup diwujudkan melalui ketersediaan data, tetapi perlu didukung mekanisme yang memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya riset dalam perumusan kebijakan juga terlihat pada konteks pemerintahan Indonesia. Asmara (2016) menyoroti bahwa hasil penelitian belum selalu menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan publik. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya memperkuat hubungan antara kegiatan penelitian dan kebutuhan pembuat kebijakan. Newman (2020), melalui tinjauan sistematis mengenai peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam menggunakan bukti, menekankan pentingnya interaksi dan kolaborasi antara peneliti dan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan tata kelola yang menghubungkan proses produksi pengetahuan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Konteks Kabupaten Sukabumi, integrasi riset dan inovasi memiliki arti strategis karena perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan permasalahan yang berbeda antarkawasan. Hasil riset klaster kewilayahan dapat digunakan untuk memperkuat ketepatan penentuan prioritas program dan menyesuaikan intervensi pembangunan dengan kebutuhan wilayah. Penelitian Dam et al. (2023) mengenai penggunaan bukti penelitian dalam intervensi yang dipimpin pemerintah daerah menunjukkan relevansi penguatan mekanisme pemanfaatan bukti pada tingkat lokal. Sejalan dengan itu, kajian Sarjiyanto et al. (2024) membahas penguatan science-based policy dalam pemanfaatan riset dan inovasi untuk mendukung daya saing daerah. Kedua kajian tersebut memberikan landasan bagi penguatan peran BAPPERIDA sebagai penghubung antara pengetahuan berbasis riset dan kebutuhan kebijakan pembangunan daerah.

Transformasi kelembagaan Bappeda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sukabumi perlu diikuti penyesuaian proses bisnis organisasi. Kerangka regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, menjadi bagian dari konteks penguatan fungsi riset dan inovasi. Pada tingkat daerah, pengaturan kelembagaan melalui peraturan Kabupaten Sukabumi yang tercantum dalam dokumen kebijakan perlu menjadi dasar penyesuaian tugas, koordinasi, dan mekanisme

kerja organisasi. Namun, perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan belum dengan sendirinya menjamin terintegrasinya hasil riset ke dalam siklus perencanaan pembangunan. Persoalan utama yang diangkat dalam makalah ini adalah lemahnya integrasi hasil riset klaster kewilayahan ke dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Apabila hasil penelitian tidak menjadi masukan yang terstruktur dalam proses perencanaan, program yang disusun berisiko belum memanfaatkan bukti yang relevan secara optimal. Iswanto (2023), melalui kajian mengenai RPJMD Kabupaten Tuban dalam perspektif evidence-based policy, memberikan konteks pembandingan bagi pembahasan penggunaan bukti dalam perencanaan pembangunan daerah. Meskipun karakteristik daerah dan objek kajiannya berbeda, kajian tersebut relevan untuk menempatkan integrasi bukti sebagai bagian dari kualitas proses perencanaan.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan evaluasi kinerja internal yang masih cenderung berorientasi pada pemenuhan administrasi. Evaluasi seharusnya tidak hanya memastikan kelengkapan dokumen dan pelaporan, tetapi juga menghasilkan informasi mengenai ketercapaian sasaran, manfaat program, serta kebutuhan perbaikan. Head (2016) menjelaskan bahwa bukti dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan apabila digunakan dalam proses penilaian dan penyesuaian program. Newman (2020) juga menegaskan pentingnya kapasitas organisasi dan hubungan kerja antara peneliti dengan pembuat kebijakan agar bukti dapat digunakan dalam keputusan nyata. Oleh sebab itu, penguatan evaluasi internal BAPPERIDA perlu menghubungkan informasi hasil riset, sasaran perencanaan, indikator kinerja, dan tindak lanjut evaluasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BAPPERIDA Kabupaten Sukabumi memerlukan mekanisme kelembagaan yang menghubungkan fungsi riset, perencanaan, dan evaluasi. Salah satu instrumen yang dapat dipertimbangkan adalah pelembagaan *Research Clearance* dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan Renja perangkat daerah. Mekanisme ini diarahkan untuk memastikan bahwa hasil riset dan inovasi yang relevan dipertimbangkan dalam penyusunan program dan kegiatan. Penguatan tersebut perlu disertai pengembangan Dashboard Evaluasi SAKIP Internal berbasis hasil agar informasi perencanaan, bukti penelitian, dan capaian kinerja dapat dimanfaatkan secara lebih terpadu. Bardach & Patashnik (2020) menjelaskan bahwa analisis kebijakan memerlukan perumusan masalah yang jelas, pengembangan alternatif, serta penilaian terhadap kelayakan dan konsekuensi setiap pilihan. Dalam konteks makalah ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menilai alternatif yang mampu menjawab kesenjangan integrasi riset dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, urgensi kebijakan bukan sekadar menambah prosedur atau aplikasi digital, melainkan membangun tata kelola yang menjadikan bukti penelitian sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pembangunan daerah.

1.2 Metode Penentuan Masalah Utama

Penentuan masalah utama dilakukan melalui dua pendekatan analisis, yaitu *Qualitative Gap Analysis* dan *Process Capability Assessment*. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi tata kelola yang diharapkan dan kondisi pelaksanaan yang tergambar dalam dokumen kebijakan BAPPERIDA Kabupaten Sukabumi. *Qualitative Gap Analysis* digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara mandat

kelembagaan, kebutuhan integrasi riset, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Analisis ini berfokus pada sejauh mana hasil riset klaster kewilayahan telah dipertimbangkan dalam penyusunan Renja perangkat daerah serta sejauh mana informasi penelitian digunakan untuk mendukung penentuan prioritas program. Sementara itu, *Process Capability Assessment* digunakan untuk menilai kemampuan proses organisasi dalam menghubungkan fungsi riset, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Penilaian diarahkan pada kejelasan prosedur, koordinasi lintas fungsi, integrasi informasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan. Howlett (2009) menjelaskan pentingnya kapasitas analitis dalam mendukung proses pembuatan kebijakan berbasis bukti. Dalam konteks ini, kapasitas organisasi perlu dinilai tidak hanya dari ketersediaan data, tetapi juga dari kemampuan mengolah dan menggunakan informasi tersebut dalam proses kebijakan.

Penggunaan kedua pendekatan ini sejalan dengan prinsip analisis kebijakan yang menekankan diagnosis masalah sebelum pemilihan alternatif penyelesaian (Bardach & Patashnik, 2020). Dengan demikian, penentuan masalah utama diarahkan pada kesenjangan integrasi hasil riset ke dalam Renja dan belum optimalnya pemanfaatan evaluasi kinerja internal untuk mendukung perbaikan perencanaan.

1.3 Identifikasi Penyebab Masalah

Identifikasi penyebab masalah dilakukan dengan menelaah aspek kelembagaan, prosedur kerja, koordinasi, pengelolaan informasi, dan kapasitas organisasi. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam dokumen kebijakan, terdapat beberapa penyebab yang perlu memperoleh perhatian.

1. Pertama, hasil riset dan inovasi belum sepenuhnya terlembaga dalam prosedur penyusunan Renja perangkat daerah. Kondisi ini dapat menyebabkan pemanfaatan hasil penelitian bergantung pada inisiatif masing-masing pelaksana, bukan pada mekanisme organisasi yang berlaku secara konsisten. Asmara (2016) menekankan pentingnya menjadikan hasil riset sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik. Karena itu, integrasi riset perlu diterjemahkan ke dalam prosedur kerja yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi.
2. Kedua, koordinasi antara fungsi riset, perencanaan, dan evaluasi perlu diperkuat. Hasil penelitian akan sulit memberikan kontribusi optimal apabila proses produksi pengetahuan tidak terhubung dengan kebutuhan perangkat daerah sebagai pengguna kebijakan. Newman (2020) mengidentifikasi interaksi dan kolaborasi antara peneliti dan pembuat kebijakan sebagai pendekatan yang sering digunakan untuk memperbaiki pemanfaatan bukti. Dengan demikian, BAPPERIDA perlu memastikan adanya alur komunikasi dan pertukaran informasi yang jelas antara penghasil bukti dan pengguna hasil riset.
3. Ketiga, informasi penelitian, dokumen perencanaan, dan data kinerja belum sepenuhnya terhubung dalam satu alur pengambilan keputusan. Keterpisahan informasi dapat menyulitkan penelusuran hubungan antara permasalahan wilayah, hasil riset, program yang direncanakan, dan capaian kinerja. Head (2008, 2016)

menekankan bahwa bukti dalam kebijakan mencakup lebih dari satu bentuk pengetahuan, sehingga pemanfaatannya memerlukan proses penggabungan informasi penelitian dengan pengalaman pelaksanaan dan pertimbangan kebijakan.

4. Keempat, evaluasi internal yang berorientasi administratif berpotensi membatasi pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan program. Evaluasi perlu memberikan informasi mengenai kesenjangan capaian, faktor penghambat, dan tindakan korektif yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pengembangan dasbor evaluasi perlu disertai indikator berbasis hasil dan mekanisme tindak lanjut, bukan hanya penyajian data secara digital.
5. Kelima, kapasitas analitis organisasi perlu mendukung penggunaan hasil penelitian dalam proses pengambilan keputusan. Howlett (2009) menempatkan kapasitas analitis sebagai unsur penting dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti. Dalam konteks BAPPERIDA, kapasitas tersebut mencakup kemampuan mengidentifikasi kebutuhan bukti, menilai relevansi hasil penelitian, menghubungkan temuan dengan indikator perencanaan, serta menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki program.

Kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa masalah integrasi riset tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah penelitian atau menyediakan aplikasi informasi. Penyelesaiannya memerlukan pembenahan proses, koordinasi, pemanfaatan data, dan kapasitas organisasi secara terpadu.

1.4 Penentuan Akar Masalah

Berdasarkan identifikasi penyebab, akar masalah dalam makalah kebijakan ini dirumuskan ke dalam dua persoalan utama.

1. Pertama, belum terlembaganya integrasi hasil riset dan inovasi ke dalam prosedur penyusunan Renja perangkat daerah. Ketidadaan mekanisme operasional yang menghubungkan hasil penelitian dengan penyusunan program dapat membatasi pemanfaatan bukti dalam penentuan prioritas pembangunan. Karena itu, hasil riset perlu memperoleh tempat yang jelas dalam proses perencanaan, disertai pembagian tanggung jawab dan mekanisme pemeriksaan yang dapat diterapkan secara konsisten.
2. Kedua, belum optimalnya integrasi evaluasi internal dengan hasil riset dan capaian kinerja berbasis hasil. Evaluasi yang lebih menekankan kelengkapan administrasi berisiko belum menghasilkan informasi yang memadai untuk memperbaiki kualitas perencanaan. Organisasi memerlukan mekanisme yang menghubungkan target, realisasi, hasil penelitian, dan tindak lanjut evaluasi agar proses pengendalian kinerja dapat mendukung pembelajaran organisasi.

Kedua akar masalah tersebut saling berkaitan. Kelemahan integrasi riset dalam perencanaan mengurangi peluang penggunaan bukti sejak penentuan program, sedangkan kelemahan evaluasi berbasis hasil membatasi pemanfaatan informasi untuk perbaikan pada periode berikutnya. Perspektif Head (2008) dan Newman (2020) mendukung pentingnya

menghubungkan pengetahuan penelitian dengan pengalaman pelaksanaan serta proses pengambilan keputusan. Sementara itu, Bardach & Patashnik (2020) memberikan landasan untuk merumuskan alternatif kebijakan berdasarkan masalah yang teridentifikasi. Dengan demikian, akar masalah tidak semata-mata terletak pada keterbatasan teknologi informasi, tetapi terutama pada belum kuatnya mekanisme kelembagaan yang menghubungkan riset, perencanaan, dan evaluasi. Teknologi digital perlu ditempatkan sebagai instrumen pendukung bagi perbaikan proses tersebut.

1.5 Pernyataan Masalah (*Problem Statement*)

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, identifikasi kesenjangan, dan penentuan akar masalah, *problem statement* dalam *policy paper* ini dirumuskan sebagai berikut:

“Transformasi kelembagaan Bappeda menjadi BAPPERIDA Kabupaten Sukabumi telah memperkuat mandat pemerintah daerah dalam mengintegrasikan fungsi perencanaan pembangunan dengan penelitian dan pengembangan. Namun, implementasi mandat tersebut belum sepenuhnya optimal, yang ditandai oleh belum terintegrasinya hasil riset dan inovasi secara sistematis ke dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, belum kuatnya koordinasi antara fungsi riset dan perencanaan, serta evaluasi kinerja internal yang masih berorientasi pada pemenuhan administratif dan pencapaian keluaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat penguatan riset dan inovasi dengan praktik perencanaan serta evaluasi kinerja pembangunan daerah. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani, pemanfaatan bukti ilmiah dalam penentuan prioritas pembangunan berpotensi tidak optimal, proses pembelajaran organisasi menjadi kurang efektif, dan ketepatan intervensi pembangunan dalam merespons kesenjangan karakteristik wilayah utara dan selatan Kabupaten Sukabumi dapat terhambat. Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perencanaan pembangunan berbasis bukti dan menghambat optimalisasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”.

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1 Kerangka Regulasi dan Kebijakan Saat Ini sebagai Pisau Analisis Yuridis

Transformasi kelembagaan Bappeda menjadi BAPPERIDA Kabupaten Sukabumi menempatkan riset dan inovasi sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Kerangka regulasi yang disebutkan dalam makalah meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kerangka regulasi tersebut perlu dianalisis berdasarkan keterkaitannya dengan pelaksanaan tugas BAPPERIDA. Perubahan kelembagaan tidak hanya menuntut penambahan fungsi riset dan inovasi, tetapi juga memerlukan penyesuaian proses bisnis agar hasil kajian dapat digunakan dalam penentuan prioritas pembangunan, penyusunan Renja perangkat daerah, dan evaluasi kinerja. Permasalahan yang diidentifikasi adalah mandat kelembagaan belum sepenuhnya

diikuti mekanisme operasional yang menghubungkan hasil riset dengan dokumen perencanaan. Hasil kajian berisiko berhenti pada publikasi dokumen apabila belum terdapat jalur formal untuk menilai relevansi, mengintegrasikan rekomendasi, dan menelusuri penggunaannya dalam perencanaan. Dengan demikian, persoalan utama tidak cukup dipahami sebagai kekurangan regulasi. Analisis juga perlu menilai kesenjangan antara mandat normatif (*das sollen*) dan pelaksanaan (*das sein*), terutama dalam hal prosedur integrasi riset, koordinasi lintas bidang, serta orientasi evaluasi kinerja. Perspektif ini menjadi dasar untuk menganalisis kondisi eksisting dan menentukan akar masalah.

2.2 Analisis Kondisi Eksisting Integrasi Riset dalam Siklus Kebijakan Daerah

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara produksi pengetahuan dan penggunaannya dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan fungsi riset seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah dokumen kajian yang dihasilkan, tetapi juga dari relevansi kajian terhadap masalah pembangunan serta tingkat pemanfaatannya oleh perangkat daerah.

2.2.2 Kondisi Koordinasi Lintas Bidang dan Kewilayahan

Hasil identifikasi adanya perbedaan orientasi kerja antara fungsi perencanaan dan fungsi riset. Bidang perencanaan cenderung menggunakan tren data makro, sedangkan fungsi riset berfokus pada penyusunan kajian dan metodologi. Ketika kedua fungsi tersebut tidak terhubung melalui mekanisme koordinasi yang memadai, hasil penelitian berisiko tidak diterjemahkan menjadi rekomendasi program yang operasional. Persoalan tersebut penting dalam konteks Kabupaten Sukabumi yang memiliki karakteristik wilayah utara dan selatan yang berbeda. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan bukti dan karakteristik spasial berisiko menghasilkan intervensi yang kurang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

2.2.3 Kondisi Evaluasi Kinerja Internal

Identifikasi pemantauan dan evaluasi kinerja internal masih cenderung berorientasi pada pemenuhan administratif. Alur pengendalian Renja melalui Form E.55 dan sistem e-SAKIP perlu memastikan bahwa informasi yang dilaporkan digunakan untuk menilai capaian sasaran, menjelaskan kesenjangan kinerja, dan merumuskan tindakan korektif. Indikator yang hanya mengukur jumlah dokumen kajian belum cukup untuk menggambarkan kontribusi fungsi riset terhadap pembangunan. Evaluasi juga perlu menilai pemanfaatan rekomendasi, perubahan program, dan tindak lanjut perangkat daerah. Dengan demikian, evaluasi kinerja perlu diarahkan dari pengukuran keluaran administratif menuju hasil yang dapat ditelusuri.

2.2.4 Kondisi Integrasi Data dan Informasi

Integrasi data menjadi prasyarat bagi pembentukan siklus kebijakan berbasis bukti. Informasi riset, dokumen perencanaan, dan capaian kinerja perlu saling terhubung agar organisasi dapat menelusuri hubungan antara rekomendasi kajian dan keputusan program. Apabila informasi tersebut tersebar dalam sistem yang belum terintegrasi, proses evaluasi akan lebih sulit mengidentifikasi kajian yang digunakan, program yang diperbaiki, serta hasil yang dicapai. Karena itu, persoalan teknologi perlu dianalisis bersama dengan tata kelola data, prosedur kerja, dan pembagian tanggung jawab antarbidang.

2.3 Analisis Kendala Implementasi Integrasi Riset dan Inovasi

Pelaksanaan integrasi riset dan inovasi ke dalam siklus perencanaan pembangunan daerah menghadapi sejumlah kendala yang saling berkaitan.

1. Kendala procedural, yaitu belum terlembaganya mekanisme formal untuk menghubungkan rekomendasi riset dengan penyusunan Renja menyebabkan pemanfaatan hasil kajian belum terjamin secara konsisten.
2. Kendala koordinasi, yaitu adanya perbedaan fokus kerja antara fungsi riset dan perencanaan dapat membatasi penyatuan hasil kajian dengan kebutuhan program serta prioritas pembangunan.
3. Kendala pengukuran kinerja, di mana Indikator yang terlalu berorientasi pada input dan output kuantitatif belum sepenuhnya menggambarkan pemanfaatan riset dan kontribusinya terhadap hasil pembangunan.
4. Kendala integrasi informasi, yaitu keterhubungan data riset, perencanaan, dan evaluasi perlu diperkuat agar penggunaan rekomendasi dan tindak lanjut kinerja dapat ditelusuri.
5. Kendala pembelajaran organisasi. Apabila evaluasi tidak menghasilkan analisis penyebab masalah dan tindakan korektif, hasil evaluasi berisiko tidak menjadi masukan bagi perencanaan periode berikutnya.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa integrasi riset bukan semata-mata persoalan ketersediaan penelitian. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum kuatnya hubungan antara hasil kajian, proses pengambilan keputusan, pengukuran kinerja, dan pembelajaran organisasi. Oleh karena itu, analisis kesenjangan perlu memetakan kondisi ideal dan kondisi aktual secara lebih terstruktur.

2.4 Analisis Kesenjangan Kebijakan (Das Sollen–Das Sein)

Analisis kesenjangan digunakan untuk membandingkan kondisi tata kelola yang diharapkan dengan kondisi yang diidentifikasi dalam dokumen makalah BAPPERIDA.

Tabel 2.1. Matriks Analisis Kesenjangan Tata Kelola Riset dan Perencanaan

Dimensi	Kondisi ideal (das sollen)	Kondisi aktual (das sein)	Kesenjangan kebijakan
Regulasi dan SOP	Hasil riset memiliki jalur formal untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Renja	Mekanisme integrasi riset belum terlembaga secara memadai	Belum ada jaminan prosedural bagi pemanfaatan riset
Koordinasi lintas bidang	Fungsi riset dan perencanaan menghasilkan rekomendasi yang saling terhubung	Orientasi kerja antarbidang belum sepenuhnya terpadu	Hasil kajian berisiko tidak diterjemahkan menjadi program

Perencanaan kewilayahan	Prioritas pembangunan mempertimbangkan bukti dan karakteristik wilayah	Integrasi hasil riset klaster kewilayahan belum optimal	Respons program terhadap perbedaan wilayah perlu diperkuat
Indikator kinerja	Pengukuran mencakup keluaran, pemanfaatan, dan hasil	Indikator riset masih cenderung berorientasi pada jumlah dokumen	Kontribusi riset terhadap keputusan belum terukur secara memadai
Evaluasi SAKIP internal	Evaluasi menghasilkan analisis capaian dan rekomendasi korektif	Proses evaluasi masih cenderung administratif	Hasil evaluasi belum optimal sebagai sarana pembelajaran
Integrasi data	Informasi riset, Renja, dan kinerja dapat ditelusuri	Keterhubungan antarsistem perlu diperkuat	Pelacakan pemanfaatan riset dan tindak lanjut belum optimal

2.4.1 Kesenjangan Regulasi dan Prosedur Operasional

Das sollen: Proses penyusunan perencanaan daerah seharusnya memiliki mekanisme yang jelas untuk mempertimbangkan hasil riset dan rekomendasi kebijakan sebelum program ditetapkan.

Das sein: Dokumen makalah mengidentifikasi belum tersedianya mekanisme internal yang memadai untuk menghubungkan hasil kajian dengan sistem perencanaan.

Policy gap: Pemanfaatan hasil riset belum sepenuhnya menjadi bagian dari prosedur kerja yang dapat ditelusuri dan dievaluasi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penguatan tata laksana integrasi riset dan perencanaan.

2.4.2 Kesenjangan Koordinasi Sektoral dan Spasial

Das sollen: Fungsi riset dan perencanaan seharusnya bekerja secara kolaboratif dalam menerjemahkan bukti penelitian menjadi prioritas pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Das sein: Makalah mengidentifikasi perbedaan orientasi kerja antarbidang dan belum optimalnya integrasi hasil riset klaster kewilayahan.

Policy gap: Belum kuatnya mekanisme koordinasi dapat membatasi penggunaan bukti dalam merumuskan intervensi yang sesuai dengan perbedaan kebutuhan wilayah utara dan selatan Kabupaten Sukabumi.

2.4.3 Kesenjangan Pengukuran Kinerja

Das sollen: Indikator kinerja fungsi riset seharusnya mengukur bukan hanya jumlah dokumen yang dihasilkan, tetapi juga pemanfaatan hasil kajian dalam perencanaan dan perbaikan program.

Das sein: Dokumen makalah menyebutkan bahwa indikator fungsi riset masih berorientasi pada keluaran kuantitatif, seperti jumlah dokumen kajian.

Policy gap: Belum optimalnya pengukuran tingkat adopsi rekomendasi riset menyulitkan organisasi untuk menilai kontribusi fungsi riset terhadap hasil pembangunan.

2.4.4 Kesenjangan Evaluasi dan Pembelajaran Organisasi

Das sollen: Evaluasi kinerja seharusnya mengidentifikasi kesenjangan target dan realisasi, menganalisis penyebabnya, serta menetapkan tindakan korektif yang menjadi masukan bagi perencanaan berikutnya.

Das sein: Proses pemantauan dan evaluasi internal masih diidentifikasi cenderung berorientasi pada pemenuhan administratif.

Policy gap: Hasil evaluasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran yang menghubungkan capaian kinerja, rekomendasi perbaikan, dan perubahan perencanaan.

2.4.5 Kesenjangan Integrasi Data

Das sollen: Data riset, perencanaan, dan evaluasi kinerja seharusnya terhubung agar proses penggunaan bukti dapat ditelusuri.

Das sein: Identifikasi perlunya penguatan hubungan antara *e-Planning*, *e-Research*, dan *e-SAKIP*.

Policy gap: Keterhubungan informasi yang belum optimal dapat membatasi kemampuan organisasi dalam melacak penggunaan rekomendasi riset serta menilai tindak lanjutnya.

Secara keseluruhan, analisis kesenjangan memperlihatkan bahwa persoalan BAPPERIDA berkaitan dengan prosedur, koordinasi, pengukuran kinerja, dan integrasi informasi. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya perlu menilai persoalan tersebut berdasarkan kerangka teori yang relevan.

2.5 Analisis Teoretis terhadap Integrasi Riset dan Inovasi

2.5.1 Perspektif Evidence-Based Policy Making

Evidence-Based Policy Making menekankan penggunaan bukti penelitian dan informasi yang relevan dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks BAPPERIDA, pendekatan ini menempatkan hasil riset sebagai masukan substantif dalam penyusunan prioritas pembangunan, bukan sekadar produk dokumentasi.

Implikasinya, keberhasilan fungsi riset perlu dinilai berdasarkan hubungan antara hasil kajian, rekomendasi, keputusan perencanaan, dan pemanfaatannya oleh perangkat daerah. Pendekatan tersebut juga memerlukan mekanisme yang memastikan bahwa bukti yang tersedia relevan dengan masalah dan kebutuhan wilayah.

2.5.2 Perspektif Result-Based Management

Result-Based Management menekankan pengelolaan kinerja berdasarkan hasil yang hendak dicapai. Dalam konteks BAPPERIDA, perspektif ini mengarahkan evaluasi dari sekadar pemeriksaan kelengkapan dokumen menuju penilaian atas capaian sasaran, pemanfaatan rekomendasi, dan tindak lanjut perbaikan. Dengan demikian, indikator kinerja fungsi riset perlu membedakan keluaran berupa dokumen kajian dari hasil berupa adopsi rekomendasi dan perubahan proses perencanaan. Evaluasi yang berorientasi hasil akan lebih berguna apabila temuan dan rekomendasinya ditindaklanjuti dalam siklus kebijakan berikutnya.

2.5.3 Perspektif Tata Kelola Kolaboratif

Integrasi riset dan perencanaan memerlukan koordinasi antara fungsi riset, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi. Setiap fungsi memiliki informasi dan tanggung jawab berbeda, tetapi seluruhnya perlu berkontribusi terhadap sasaran pembangunan yang sama. Tata kelola kolaboratif memerlukan pembagian peran, prosedur pertukaran informasi, mekanisme penyelesaian perbedaan prioritas, dan tanggung jawab atas tindak lanjut. Tanpa mekanisme tersebut, integrasi berisiko bergantung pada komunikasi informal dan inisiatif individual.

2.5.4 Perspektif Pembelajaran Kebijakan

Pembelajaran kebijakan terjadi ketika hasil pelaksanaan dan evaluasi digunakan untuk memperbaiki keputusan pada periode berikutnya. Dalam konteks BAPPERIDA, siklus pembelajaran menghubungkan temuan riset, keputusan program, capaian kinerja, dan evaluasi. Perspektif ini menegaskan bahwa data dan dokumen tidak otomatis menghasilkan pembelajaran. Organisasi memerlukan prosedur yang mengubah informasi menjadi keputusan korektif, sekaligus mendokumentasikan tindak lanjutnya agar dapat digunakan dalam perencanaan selanjutnya.

2.6 Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*)

Berdasarkan analisis kondisi eksisting, kendala implementasi, kesenjangan kebijakan, dan perspektif teoretis, terdapat dua akar masalah utama yang perlu menjadi perhatian.

Akar Masalah 1: Belum Terlembaganya Integrasi Riset dalam Proses Perencanaan

Hasil riset dan rekomendasi kebijakan belum sepenuhnya dihubungkan dengan penyusunan Renja perangkat daerah melalui prosedur formal yang dapat ditelusuri.

Hubungan kausalnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Belum kuatnya prosedur integrasi riset dan perencanaan

Hasil kajian belum menjadi masukan yang konsisten dalam penyusunan Renja

Rekomendasi program belum sepenuhnya didukung bukti yang relevan

Perencanaan berisiko kurang responsif terhadap kebutuhan sektoral dan kewilayahan

Akar masalah ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi riset perlu diikuti penataan prosedur dan koordinasi kerja. Tanpa perubahan tersebut, peningkatan jumlah penelitian belum tentu meningkatkan penggunaan bukti dalam keputusan pembangunan.

Akar Masalah 2: Belum Optimalnya Evaluasi Kinerja Berbasis Hasil

Evaluasi internal yang cenderung administratif dan indikator yang lebih menekankan jumlah dokumen belum sepenuhnya menunjukkan kontribusi fungsi riset terhadap hasil pembangunan.

Hubungan kausalnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Indikator dan evaluasi belum sepenuhnya berorientasi pada hasil

Pemanfaatan rekomendasi riset belum terukur secara memadai

Tindak lanjut evaluasi belum optimal menjadi masukan perencanaan

Pembelajaran organisasi dan perbaikan kebijakan menjadi terbatas

Akar masalah ini menegaskan perlunya penguatan indikator, proses evaluasi, dan pelacakan tindak lanjut. Pemanfaatan sistem digital dapat mendukung upaya tersebut apabila disertai perubahan prosedur dan orientasi pengukuran kinerja.

BAB III ALTERNATIF/PILIHAN KEBIJAKAN

3.1 Perumusan Alternatif Kebijakan

Permasalahan integrasi riset dan inovasi dalam siklus perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan hasil penelitian, tetapi juga dengan belum optimalnya mekanisme yang menghubungkan hasil riset, perumusan program perangkat daerah, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja. Hasil analisis pada BAB II menunjukkan dua akar masalah utama, yaitu belum melembaganya integrasi hasil riset ke dalam proses perencanaan perangkat daerah dan belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang berorientasi pada pemanfaatan bukti serta pencapaian hasil pembangunan. Kedua akar masalah tersebut menunjukkan bahwa penguatan *evidence-based policy* membutuhkan perubahan proses, bukan sekadar penambahan kegiatan penelitian atau penyediaan aplikasi digital. BAPPERIDA perlu memperkuat perannya sebagai penghubung antara kebutuhan pembangunan, produksi pengetahuan, pemanfaatan hasil penelitian, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, alternatif kebijakan perlu dirancang berdasarkan kemampuan masing-masing opsi dalam memperbaiki tata kelola, memperkuat koordinasi lintas bidang, dan meningkatkan keterlacakan pemanfaatan hasil riset dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan akar masalah tersebut, terdapat tiga alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan.

Alternatif 1. Pelembagaan Research Clearance dan Dashboard Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal Terintegrasi

Alternatif pertama menekankan reformasi proses bisnis perencanaan melalui pelembagaan mekanisme *research clearance* dan pengembangan dashboard monitoring dan evaluasi kinerja internal yang terintegrasi. Research clearance merupakan mekanisme penelaahan

yang memastikan bahwa usulan program atau kegiatan strategis perangkat daerah telah mempertimbangkan bukti yang relevan, termasuk hasil penelitian, kajian kebijakan, data pembangunan, serta rekomendasi inovasi.

Melalui mekanisme ini, BAPPERIDA dapat menetapkan prosedur yang menghubungkan hasil riset dengan proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Usulan program strategis perlu menunjukkan permasalahan yang hendak diselesaikan, bukti yang mendasari intervensi, keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah, serta indikator hasil yang akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Bidang yang menangani riset dan inovasi berperan memberikan telaah substantif, sedangkan bidang perencanaan memastikan kesesuaian usulan dengan prioritas dan dokumen perencanaan daerah.

Mekanisme tersebut selanjutnya diperkuat dengan dashboard monitoring dan evaluasi yang menghubungkan informasi penelitian, rekomendasi kebijakan, perangkat daerah pengguna, program terkait, status tindak lanjut, serta capaian indikator kinerja. Dashboard dapat dikembangkan secara bertahap dengan memanfaatkan sistem informasi yang telah tersedia, setelah BAPPERIDA menilai kesiapan data, interoperabilitas, dan dukungan teknisnya.

Alur implementasi alternatif pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

Identifikasi kebutuhan pembangunan → penelusuran bukti riset → research clearance → integrasi ke dalam perencanaan → pelaksanaan program → monitoring dan evaluasi → tindak lanjut hasil evaluasi → pembelajaran kebijakan.

Keunggulan alternatif ini terletak pada kemampuannya menghubungkan hasil riset dengan proses perencanaan dan evaluasi kinerja dalam satu rangkaian yang dapat ditelusuri. Namun, pelaksanaannya membutuhkan komitmen pimpinan, penyempurnaan SOP, pembagian peran lintas bidang, standarisasi data, serta penyesuaian sistem informasi. Oleh karena itu, implementasi perlu dilakukan secara bertahap agar mekanisme baru tidak menambah beban administrasi tanpa menghasilkan perbaikan substantif.

Alternatif 2. Penguatan Kapasitas Perencanaan Berbasis Bukti melalui *Research Clinic* dan Pendampingan Perangkat Daerah

Alternatif kedua menekankan peningkatan kapasitas aparatur dalam mengidentifikasi, menilai, dan menggunakan hasil riset untuk menyusun kebijakan serta program pembangunan. Alternatif ini berangkat dari pertimbangan bahwa ketersediaan penelitian tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan berbasis bukti apabila perencana belum memiliki kemampuan memadai untuk menilai relevansi temuan, memahami implikasi kebijakan, dan menerjemahkan rekomendasi penelitian menjadi program yang terukur.

BAPPERIDA dapat mengembangkan *research clinic* sebagai forum konsultasi antara perencana, pengelola riset dan inovasi, perangkat daerah, perguruan tinggi, serta peneliti. Forum tersebut berfungsi membantu perangkat daerah mengidentifikasi masalah pembangunan, merumuskan pertanyaan kebijakan, menentukan kebutuhan bukti, menilai kualitas hasil penelitian, dan menerjemahkan rekomendasi ke dalam rancangan program serta indikator kinerja. Pendampingan dapat diprioritaskan kepada perangkat daerah yang mengelola isu strategis pembangunan atau memiliki kesenjangan yang nyata antara

rekomendasi penelitian dan program yang direncanakan. Setiap pendampingan diarahkan menghasilkan dokumen ringkas yang memuat rumusan masalah, bukti pendukung, alternatif intervensi, rekomendasi kebijakan, dan indikator keberhasilan.

Alur implementasi alternatif kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pemetaan kebutuhan kompetensi → identifikasi masalah perangkat daerah → research clinic → penelaahan bukti → perumusan rekomendasi → integrasi ke dalam rancangan program → pendampingan tindak lanjut → evaluasi pemanfaatan bukti.

Keunggulan alternatif ini adalah kemampuannya meningkatkan kompetensi aparatur dan membangun budaya penggunaan bukti dalam pengambilan keputusan. Kebutuhan investasi teknologi juga relatif lebih rendah karena pelaksanaan dapat memanfaatkan forum koordinasi, tenaga ahli, serta jejaring perguruan tinggi yang tersedia. Meskipun demikian, keberhasilan alternatif ini sangat bergantung pada kesinambungan pendampingan, ketersediaan tenaga yang kompeten, dan kewenangan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi. Tanpa perubahan prosedur perencanaan dan mekanisme pemantauan, hasil research clinic berisiko berhenti pada peningkatan pengetahuan tanpa mengubah keputusan program.

Alternatif 3. Penguatan Evaluasi Kinerja Internal Berbasis Hasil dan Tindak Lanjut Rekomendasi Riset

Alternatif ketiga berfokus pada penguatan evaluasi kinerja internal agar tidak hanya menilai kelengkapan dokumen dan kepatuhan administratif, tetapi juga menilai pemanfaatan hasil riset, pencapaian hasil program, serta tindak lanjut rekomendasi kebijakan. Alternatif ini menempatkan evaluasi sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAPPERIDA dapat menyempurnakan instrumen evaluasi internal dengan menambahkan aspek keterlacakan bukti, kesesuaian intervensi dengan masalah pembangunan, pemanfaatan rekomendasi penelitian, pencapaian indikator hasil, serta tindakan korektif berdasarkan hasil evaluasi. Dengan pendekatan ini, perangkat daerah tidak cukup melaporkan bahwa suatu program telah dilaksanakan, tetapi juga perlu menjelaskan dasar pemilihan intervensi, hasil yang dicapai, kendala pelaksanaan, dan perbaikan yang akan dilakukan. Implementasi alternatif ini dapat dilakukan dengan mengembangkan format evaluasi yang seragam, menetapkan mekanisme verifikasi tindak lanjut, serta menyelenggarakan forum evaluasi lintas bidang secara berkala. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam perencanaan periode berikutnya agar pembelajaran dari program sebelumnya menjadi bagian dari siklus kebijakan.

Alur implementasi alternatif ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penetapan indikator hasil → pemantauan pelaksanaan program → evaluasi pemanfaatan riset → verifikasi capaian → identifikasi kesenjangan → penetapan tindakan korektif → integrasi pembelajaran ke dalam perencanaan berikutnya.

Keunggulan alternatif ini terletak pada penguatan akuntabilitas dan pembelajaran kebijakan melalui evaluasi yang lebih substantif. Alternatif ini juga dapat memanfaatkan mekanisme evaluasi kinerja internal yang telah berjalan. Namun, evaluasi yang diperkuat tidak akan sepenuhnya menyelesaikan persoalan apabila hasil penelitian belum dihubungkan dengan proses penyusunan program sejak awal. Oleh karena itu, alternatif ketiga lebih kuat sebagai instrumen pengendalian dan pembelajaran daripada sebagai satu-satunya solusi untuk mengintegrasikan riset ke dalam perencanaan.

3.2 Metode Penilaian dan Hasil Pemilihan Alternatif Kebijakan

Pemilihan alternatif kebijakan menggunakan Kriteria Bardach dengan empat dimensi penilaian, yaitu *Technical Feasibility*, *Economic/Financial Possibility*, *Political Viability*, dan *Administrative Operability*. Keempat kriteria tersebut digunakan untuk membandingkan kelayakan pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, dukungan organisasi, serta kemampuan administratif setiap alternatif.

Penilaian menggunakan skala 1–10, dengan skor 1 menunjukkan tingkat kelayakan yang sangat rendah dan skor 10 menunjukkan tingkat kelayakan yang sangat tinggi. Skor diberikan berdasarkan pertimbangan analitis terhadap karakteristik masalah, kebutuhan implementasi, dan potensi pemanfaatan kapasitas kelembagaan BAPPERIDA yang telah tersedia. Skor dalam tabel berikut merupakan penilaian awal untuk kepentingan analisis kebijakan, bukan hasil survei atau pengukuran empiris terhadap para pemangku kepentingan. Karena itu, skor perlu divalidasi melalui pembahasan bersama pimpinan BAPPERIDA, bidang terkait, dan perangkat daerah pengguna.

Kriteria penilaian dioperasionalkan sebagai berikut.

1. *Technical Feasibility* (Kelayakan Teknis). Menilai ketersediaan data, teknologi, kompetensi aparatur, metode kerja, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan alternatif kebijakan.
2. *Economic/Financial Possibility* (Kelayakan Ekonomi dan Finansial). Menilai kebutuhan anggaran, efisiensi pemanfaatan sumber daya, kemungkinan penggunaan sistem dan program yang telah tersedia, serta keberlanjutan pembiayaan.
3. *Political Viability* (Kelayakan Politik dan Dukungan Organisasi). Menilai potensi dukungan pimpinan daerah, pimpinan BAPPERIDA, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lain terhadap perubahan mekanisme perencanaan dan evaluasi.
4. *Administrative Operability* (Kelayakan Administratif dan Operasional). Menilai kesesuaian alternatif dengan struktur organisasi, kejelasan kewenangan, kebutuhan SOP, kapasitas koordinasi lintas bidang, dan kemampuan pelaksanaan secara berkelanjutan.

Tabel 3.1. Matriks Seleksi Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria Bardach

Alternatif kebijakan	Technical Feasibility	Economic/Financial Possibility	Political Viability	Administrative Operability	Total
----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	-------

Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (ECOS-PRENEURS)

Published by: PT Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 3025-034X

Volume: 4 Nomor: 2 (November: 2026) hal: 104-130

1. Pelembagaan Research Clearance dan Dashboard Monev Terintegrasi	9	8	9	9	35
2. Penguatan Kapasitas melalui Research Clinic dan Pendampingan	9	9	9	8	35
3. Penguatan Evaluasi Kinerja Internal Berbasis Hasil	8	9	8	9	34

Sumber: Penilaian analitis awal berdasarkan akar masalah dan kebutuhan integrasi riset dalam perencanaan pembangunan daerah, 2026. Skor perlu divalidasi sebelum digunakan sebagai dasar keputusan formal.

Hasil penilaian awal menunjukkan bahwa alternatif pertama dan kedua memperoleh skor yang sama, yaitu 35 poin, sedangkan alternatif ketiga memperoleh 34 poin. Kesamaan skor antara alternatif pertama dan kedua menunjukkan bahwa kedua opsi memiliki potensi kelayakan yang relatif berimbang, tetapi menawarkan mekanisme penyelesaian masalah yang berbeda. Alternatif pertama memperkuat sistem dan prosedur integrasi, sedangkan alternatif kedua memperkuat kapasitas aparatur sebagai pengguna bukti. Oleh karena itu, pemilihan kebijakan prioritas tidak cukup didasarkan pada total skor. Analisis juga perlu mempertimbangkan kesesuaian alternatif dengan akar masalah, kemampuan membangun perubahan yang berkelanjutan, serta peluang mengintegrasikan opsi lain sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan.

3.2.1 Analisis Alternatif 1: Pelembagaan Research Clearance dan Dashboard Monev Terintegrasi

Alternatif pertama memperoleh skor total 35 poin. Skor kelayakan teknis sebesar 9 menunjukkan bahwa mekanisme integrasi dapat dikembangkan melalui penyempurnaan proses bisnis, standardisasi dokumen, serta pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia, sepanjang kesiapan teknisnya dapat dipastikan. Penilaian ini tidak mengasumsikan bahwa seluruh sistem informasi telah terintegrasi; kebutuhan interoperabilitas dan kualitas data tetap harus diperiksa pada tahap persiapan.

Pada aspek ekonomi dan finansial, skor 8 mencerminkan adanya kebutuhan awal untuk menyempurnakan SOP, menyiapkan standar data, mengembangkan atau menyesuaikan dashboard, dan meningkatkan kompetensi aparatur. Namun, kebutuhan tersebut dapat dikendalikan melalui penerapan bertahap serta pemanfaatan infrastruktur yang tersedia

sebelum BAPPERIDA memutuskan pengembangan sistem baru. Kelayakan politik dan dukungan organisasi memperoleh skor 9 karena alternatif ini mendukung penguatan perencanaan berbasis bukti, peningkatan akuntabilitas, dan keterpaduan pelaksanaan tugas BAPPERIDA. Sementara itu, kelayakan administratif dan operasional memperoleh skor 9 karena mekanisme dapat dilembagakan melalui pembagian peran lintas bidang dan penyempurnaan SOP. Meskipun demikian, pelaksanaan tetap membutuhkan kejelasan kewenangan, komitmen pimpinan, serta disiplin perangkat daerah dalam menyampaikan dan menindaklanjuti informasi. Keunggulan utama alternatif pertama adalah kemampuannya mengubah integrasi riset dari praktik yang bergantung pada inisiatif individual menjadi bagian dari proses perencanaan yang lebih sistematis. Research clearance memastikan bahwa bukti dipertimbangkan sebelum program dirumuskan, sedangkan dashboard membantu memantau apakah rekomendasi yang relevan benar-benar ditindaklanjuti. Alternatif ini memiliki karakter reformasi sistem dan proses bisnis karena menghubungkan tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembelajaran kebijakan. Namun, implementasinya perlu disertai pendampingan bagi perencana agar proses penelaahan bukti tidak berubah menjadi persyaratan administratif semata.

3.2.2 Analisis Alternatif 2: Penguatan Kapasitas melalui *Research Clinic* dan Pendampingan

Alternatif kedua memperoleh skor total 35 poin. Kelayakan teknis memperoleh skor 9 karena pelaksanaannya dapat memanfaatkan forum koordinasi, tenaga perencana, pengelola riset dan inovasi, serta jejaring akademisi yang tersedia. Alternatif ini tidak membutuhkan pembangunan sistem informasi yang kompleks pada tahap awal.

Kelayakan ekonomi dan finansial memperoleh skor 9 karena pelaksanaan dapat memanfaatkan kegiatan peningkatan kapasitas dan koordinasi yang telah direncanakan. Meski demikian, kesinambungan pendampingan, penyediaan tenaga ahli, dan pengembangan materi tetap memerlukan alokasi sumber daya yang memadai. Kelayakan politik dan dukungan organisasi memperoleh skor 9 karena peningkatan kompetensi dapat membantu perangkat daerah menyusun program yang lebih relevan dengan permasalahan pembangunan. Sementara itu, kelayakan administratif dan operasional memperoleh skor 8 karena pelaksanaan membutuhkan jadwal konsultasi, pengelolaan pengetahuan, tenaga pendamping, dan mekanisme tindak lanjut yang konsisten. Keunggulan alternatif kedua terletak pada peningkatan kemampuan aparatur untuk menafsirkan hasil penelitian dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini juga dapat memperkuat komunikasi antara peneliti dan pembuat kebijakan sehingga rekomendasi penelitian lebih mudah diterjemahkan ke dalam pilihan intervensi.

Keterbatasan utamanya adalah risiko bahwa hasil pendampingan tidak diterapkan apabila prosedur perencanaan tidak mewajibkan atau memfasilitasi penggunaan bukti. Oleh sebab itu, *research clinic* akan lebih efektif apabila terhubung dengan mekanisme formal dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja.

3.2.3 Analisis Alternatif 3: Penguatan Evaluasi Kinerja Internal Berbasis Hasil

Alternatif ketiga memperoleh skor total 34 poin. Kelayakan teknis memperoleh skor 8 karena instrumen evaluasi dapat disempurnakan dengan memanfaatkan mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang telah berjalan. Namun, penambahan indikator pemanfaatan riset membutuhkan definisi operasional yang jelas, bukti pendukung, dan metode verifikasi yang konsisten.

Kelayakan ekonomi dan finansial memperoleh skor 9 karena perbaikan dapat difokuskan pada penyempurnaan instrumen, format pelaporan, serta prosedur tindak lanjut tanpa harus langsung membangun sistem baru. Kelayakan politik dan dukungan organisasi memperoleh skor 8 karena penguatan evaluasi dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menuntut perubahan kebiasaan pelaporan yang selama ini mungkin lebih menekankan kelengkapan administratif. Kelayakan administratif dan operasional memperoleh skor 9 karena evaluasi dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pengendalian kinerja internal. Walaupun demikian, penerapannya memerlukan standar bukti yang konsisten dan pembagian tanggung jawab yang jelas agar evaluasi tidak hanya menghasilkan catatan temuan, tetapi juga mendorong tindakan korektif.

Keunggulan alternatif ketiga adalah kemampuannya memperkuat hubungan antara pelaksanaan program, pencapaian hasil, dan pembelajaran organisasi. Melalui evaluasi berbasis hasil, BAPPERIDA dapat mengidentifikasi apakah rekomendasi riset telah dimanfaatkan, apakah intervensi menghasilkan perubahan yang diharapkan, dan perbaikan apa yang diperlukan pada periode perencanaan berikutnya.

Keterbatasan alternatif ini adalah sifatnya yang lebih kuat pada tahap pengendalian dan evaluasi. Apabila integrasi riset belum dibangun sejak penyusunan program, evaluasi berisiko hanya menemukan kesenjangan tanpa memiliki mekanisme yang memadai untuk mencegah kesenjangan tersebut pada awal proses perencanaan.

3.3 Kesimpulan Opsi Terpilih

Berdasarkan perbandingan ketiga alternatif, pelembagaan research clearance dan dashboard monitoring dan evaluasi terintegrasi direkomendasikan sebagai alternatif kebijakan utama. Rekomendasi tersebut didasarkan pada kesesuaiannya dengan akar masalah, khususnya belum melembaganya pemanfaatan riset dalam proses perencanaan dan belum optimalnya keterlacakan tindak lanjut rekomendasi penelitian.

Alternatif pertama diprioritaskan bukan karena memiliki skor tertinggi secara mutlak skornya sama dengan alternatif kedua melainkan karena secara langsung memperbaiki mekanisme yang menghubungkan hasil riset dengan perencanaan dan evaluasi. Alternatif kedua dan ketiga tetap diperlukan sebagai komponen pendukung untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat digunakan secara substantif dan berkelanjutan. Dengan demikian, arsitektur kebijakan yang direkomendasikan menggabungkan tiga unsur berikut.

1. Unsur integrasi sistem: pelembagaan research clearance, standardisasi dokumen, dan pengembangan dashboard monitoring dan evaluasi.
2. Unsur penguatan kapasitas: pelaksanaan research clinic dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam menggunakan bukti penelitian untuk merumuskan program.

3. Unsur akuntabilitas dan pembelajaran: penguatan evaluasi kinerja internal, verifikasi tindak lanjut rekomendasi, dan penggunaan hasil evaluasi untuk memperbaiki perencanaan berikutnya.

Hubungan antarkomponen tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Hubungan Antarkomponen

Siklus berulang: hasil evaluasi menjadi masukan bagi penentuan kebutuhan riset dan perencanaan periode berikutnya.

Penerapan alternatif utama perlu dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, BAPPERIDA dapat menetapkan SOP, menentukan jenis program yang memerlukan research clearance, dan menyepakati indikator pemanfaatan hasil riset. Tahap berikutnya berfokus pada uji coba mekanisme pada program prioritas, pengembangan dashboard sesuai kesiapan data, dan pendampingan bagi perangkat daerah. Setelah proses uji coba dievaluasi, BAPPERIDA dapat memperluas penerapan secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, penguatan evidence-based policy tidak diposisikan sebagai penambahan aplikasi atau kewajiban dokumentasi semata. Kebijakan diarahkan untuk membangun mekanisme kelembagaan yang menghubungkan pengetahuan, keputusan program, kinerja pembangunan, dan pembelajaran organisasi. Pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kapasitas sumber daya, kesiapan sistem informasi, kewenangan masing-masing bidang, serta hasil validasi terhadap skor pemilihan alternatif.

BAB IV: REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Rekomendasi Kebijakan Utama

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, penentuan akar masalah, analisis kondisi eksisting, analisis kesenjangan kebijakan, serta evaluasi alternatif menggunakan kriteria Bardach, rekomendasi utama dalam makalah kebijakan ini adalah:

“Penguatan Evidence-Based Policy melalui Pelembagaan Research Clearance dan Integrasi Dashboard Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi.”

Untuk memudahkan implementasi dan komunikasi kebijakan, model tersebut dapat dikembangkan dengan identitas:

SI-RASET — Sistem Integrasi Riset dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

SI-RASET merupakan usulan arsitektur integrasi tata kelola riset, perencanaan, dan evaluasi kinerja, bukan program baru yang menggantikan sistem perencanaan yang telah berjalan. Model ini menghubungkan hasil riset dan inovasi dengan proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah, penetapan indikator kinerja, pemantauan tindak lanjut rekomendasi, serta evaluasi hasil pembangunan.

Kebijakan ini diarahkan untuk mengubah pola tata kelola dari proses yang terfragmentasi menjadi proses yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Dalam pola yang terfragmentasi, hasil riset berpotensi berhenti sebagai dokumen kajian, perencanaan berjalan berdasarkan prosedur rutin, dan evaluasi kinerja lebih berfokus pada pemenuhan administrasi. Melalui SI-RASET, hasil riset diharapkan menjadi salah satu dasar penetapan program, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai tindak lanjut dan memberikan masukan bagi perencanaan berikutnya. Dengan demikian, perubahan tata kelola yang dituju adalah sebagai berikut.

Pola sebelumnya:

Hasil riset → dokumen kajian → proses perencanaan yang belum terhubung secara sistematis → evaluasi administratif.

Pola yang direkomendasikan:

Hasil riset dan inovasi → research clearance → integrasi ke dalam perencanaan → pelaksanaan program → monitoring dan evaluasi kinerja → tindak lanjut rekomendasi → perbaikan kebijakan.

SI-RASET dikembangkan melalui tiga komponen utama:

1. Pelembagaan research clearance. Komponen ini menetapkan prosedur penelaahan bukti riset pada usulan program strategis dan program yang relevan. Penelaahan meliputi kesesuaian masalah, relevansi bukti, keterkaitan dengan prioritas pembangunan, rekomendasi intervensi, serta indikator hasil yang akan dievaluasi.
2. Integrasi dashboard monitoring dan evaluasi. Komponen ini menghubungkan informasi hasil riset, perangkat daerah pengguna, program terkait, status tindak lanjut rekomendasi, dan capaian indikator kinerja. Pengembangannya disesuaikan dengan kesiapan data dan sistem informasi yang tersedia.

3. Penguatan kapasitas dan pembelajaran kebijakan. Komponen ini meningkatkan kemampuan aparatur dalam menilai kualitas bukti, menerjemahkan hasil penelitian ke dalam usulan program, dan menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki keputusan pembangunan.

Ketiga komponen tersebut membentuk satu mekanisme yang saling mendukung. Research clearance memperkuat kualitas masukan perencanaan, dashboard menyediakan keterlacakan informasi, dan penguatan kapasitas aparatur mendukung pemanfaatan bukti secara substantif.

4.2 Arsitektur Implementasi SI-RISET

SI-RISET dirancang sebagai mekanisme tata kelola internal BAPPERIDA Kabupaten Sukabumi yang mengintegrasikan fungsi riset dan inovasi, perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan. Implementasinya tidak harus dimulai dengan pembangunan aplikasi baru secara menyeluruh. BAPPERIDA dapat memulai melalui pembenahan prosedur, penyeragaman format data, dan pengujian alur kerja sebelum mengembangkan integrasi digital yang lebih luas.

Secara operasional, arsitektur SI-RISET terdiri atas lima tahapan.

Tahap 1. Identifikasi Bukti Riset

Inventarisasi hasil penelitian, rekomendasi kebijakan, data pembangunan, dan kebutuhan perangkat daerah.

Tahap 2. Research Clearance

Penelaahan relevansi, kualitas bukti, kesesuaian prioritas, dan kelayakan rekomendasi untuk mendukung perencanaan.

Tahap 3. Integrasi ke dalam Perencanaan

Pencatatan keterkaitan hasil riset dengan usulan program, indikator kinerja, dan perangkat daerah penanggung jawab.

Tahap 4. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan pelaksanaan program, status tindak lanjut rekomendasi, capaian indikator, dan kendala implementasi.

Tahap 5. Pembelajaran dan Perbaikan Kebijakan

Penggunaan hasil evaluasi untuk memperbaiki program, memperbarui kebutuhan riset, dan meningkatkan kualitas perencanaan berikutnya.



Gambar 4.1. Arsitektur Usulan SI-RISET Kabupaten Sukabumi. Sumber: Dikembangkan berdasarkan analisis kebijakan dalam makalah ini.

Arsitektur ini menempatkan evaluasi sebagai bagian dari siklus pembelajaran, bukan sebagai tahapan administratif yang berdiri sendiri. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi umpan balik untuk menilai apakah rekomendasi riset telah digunakan, apakah program menghasilkan perubahan yang diharapkan, dan apakah diperlukan penelitian lanjutan.

4.3 Rencana Aksi Operasional

Implementasi SI-RISET dilaksanakan secara bertahap agar perubahan prosedur, kesiapan data, dan kapasitas aparatur dapat dikembangkan secara proporsional. Peta jalan berikut menggunakan tiga tahapan utama yang disesuaikan dengan rencana aksi dalam dokumen awal makalah kebijakan.

4.3.1 Tahapan Pelaksanaan

Tahap I — Jangka Pendek (Bulan 1–3): Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Tahap pertama berfokus pada penyiapan landasan operasional. BAPPERIDA perlu menyusun SOP research clearance, menetapkan kriteria penelaahan bukti, membentuk tim lintas

fungsi, serta menentukan program atau perangkat daerah yang akan menjadi lokasi uji coba. Pada tahap ini, BAPPERIDA juga perlu memetakan hasil riset yang tersedia dan mengidentifikasi kebutuhan data untuk mendukung perencanaan.

Tahap II — Jangka Menengah (Bulan 3–6): Integrasi Data dan Uji Coba Sistem

Tahap kedua berfokus pada penyiapan dashboard monitoring dan evaluasi. Kegiatan meliputi pemetaan sumber data, penyeragaman format informasi, penyusunan prototipe dashboard, dan pengujian hubungan antara data riset, perencanaan, dan kinerja. Penerapan research clearance dilakukan pada program atau perangkat daerah yang telah dipilih agar kendala proses dapat diidentifikasi sebelum perluasan implementasi.

Tahap III — Jangka Panjang (Bulan 6–12): Penguatan Kapasitas dan Perluasan Implementasi

Tahap ketiga berfokus pada peningkatan kompetensi aparatur melalui research clinic, evaluasi hasil uji coba, penyempurnaan SOP, dan perluasan penerapan secara bertahap. Perluasan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, kesiapan perangkat daerah, kualitas data, serta ketersediaan sumber daya. Jadwal tersebut merupakan rancangan awal yang perlu diselaraskan dengan kalender perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

4.3.2 Matriks Rencana Aksi 5W+1H

Tabel 4.1. Matriks Rencana Aksi Implementasi SI-RISET

Program (What)	Tujuan (Why)	Penanggung jawab (Who)	Fokus (Where)	Waktu (When)	Mekanisme (How)
Penyusunan SOP <i>research clearance</i>	Melembagakan penelaahan bukti riset dalam perencanaan	Kepala BAPPERIDA, Sekretariat, dan bidang terkait	Tata kelola internal BAPPERIDA	Bulan 1–3	Menetapkan alur penelaahan, kriteria bukti, format dokumentasi, dan pembagian tanggung jawab
Pembentukan tim lintas fungsi	Memperkuat koordinasi riset, perencanaan, dan evaluasi	Kepala BAPPERIDA dan pejabat bidang terkait	Lintas bidang BAPPERIDA	Bulan 1–3	Menetapkan tim, tugas, jadwal koordinasi, serta mekanisme tindak lanjut
Pemetaan hasil riset dan data pembangunan	Menyediakan dasar informasi untuk penelaahan kebijakan	Bidang riset dan inovasi bersama bidang perencanaan dan evaluasi	Dokumen riset dan data pembangunan	Bulan 1–3	Menginventarisasi penelitian, rekomendasi, indikator, sumber data, dan perangkat daerah pengguna
Pengembangan awal dashboard	Meningkatkan keterlacakan hasil riset dan	Bidang perencanaan, pengendalian	Sistem informasi	Bulan 3–6	Mengembangkan prototipe dashboard berdasarkan

Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (ECOS-PRENEURS)

Published by: PT Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 3025-034X

Volume: 4 Nomor: 2 (November: 2026) hal: 104-130

	tindak lanjutnya	dan evaluasi, serta pengelola teknologi informasi	internal BAPPERIDA		kebutuhan data dan kemampuan sistem yang tersedia
Uji coba research clearance	Menguji kelayakan prosedur sebelum perluasan	Tim lintas fungsi dan perangkat daerah lokasi uji coba	Program atau perangkat daerah prioritas	Bulan 4-6	Menelaah usulan, mencatat rekomendasi, dan mendokumentasikan kendala proses
Pelaksanaan research clinic	Meningkatkan kemampuan aparatur menggunakan bukti	Bidang riset dan inovasi bersama bidang terkait	BAPPERIDA dan perangkat daerah pengguna	Bulan 6-9	Melakukan konsultasi bukti, penyusunan ringkasan kebijakan, dan pendampingan pemanfaatan hasil riset
Evaluasi dan penyempurnaan	Memastikan sistem menghasilkan perbaikan proses	Pimpinan BAPPERIDA dan tim monitoring dan evaluasi	Proses perencanaan dan evaluasi internal	Bulan 6-9	Menilai kualitas penelaahan, tindak lanjut rekomendasi, keterlacakan data, dan kendala implementasi
Perluasan dan standardisasi	Memperkuat penerapan secara konsisten	Kepala BAPPERIDA bersama perangkat daerah terkait	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Bulan 9-12	Menyempurnakan prosedur, memperluas penerapan berdasarkan evaluasi, dan menetapkan pemantauan berkala

Sumber: Dikembangkan dari rencana aksi kebijakan BAPPERIDA Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan matriks tersebut memerlukan penetapan penanggung jawab operasional melalui koordinasi internal. Pembagian tugas yang jelas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa setiap rekomendasi memiliki pihak yang bertanggung jawab atas tindak lanjutnya.

4.4 Indikator Keberhasilan dan Evaluasi Kebijakan

Keberhasilan SI-RISET perlu dinilai berdasarkan perubahan tata kelola dan pemanfaatan bukti, bukan hanya berdasarkan tersusunnya SOP atau tersedianya dashboard. Evaluasi perlu membedakan keluaran kegiatan (output) dari hasil perubahan proses (outcome).

Tabel 4.2. Indikator Keberhasilan Implementasi SI-RISET

Dimensi	Indikator yang diusulkan	Bukti verifikasi
Kelembagaan	SOP <i>research clearance</i> ditetapkan dan digunakan	Dokumen SOP dan catatan penerapan
Integrasi riset	Usulan program strategis yang relevan telah melalui penelaahan bukti	Dokumen usulan dan hasil penelaahan
Pemanfaatan rekomendasi	Status tindak lanjut rekomendasi riset tercatat	Catatan tindak lanjut dan laporan perangkat daerah
Integrasi data	Informasi riset, perencanaan, dan kinerja tersedia dalam format yang dapat ditelusuri	Dokumentasi data dan dashboard
Kapasitas aparatur	Aparatur menunjukkan kemampuan lebih baik dalam menilai dan menggunakan bukti	Hasil asesmen, ringkasan kebijakan, dan dokumen perencanaan
Evaluasi kinerja	Hasil evaluasi menghasilkan tindakan korektif yang terdokumentasi	Laporan evaluasi dan rencana perbaikan
Pembelajaran kebijakan	Temuan pelaksanaan digunakan dalam perencanaan berikutnya	Dokumen tindak lanjut dan revisi perencanaan yang relevan

Indikator tersebut merupakan rancangan awal. BAPPERIDA perlu menetapkan nilai dasar (baseline), target, metode pengukuran, dan frekuensi evaluasi sebelum pelaksanaan. Target numerik tidak ditetapkan dalam kajian ini karena belum tersedia data dasar yang cukup untuk menentukan besaran yang realistis.

Evaluasi dapat dilakukan secara berkala dengan memeriksa tiga hal. Pertama, apakah mekanisme *research clearance* telah dijalankan sesuai SOP. Kedua, apakah rekomendasi riset telah ditindaklanjuti dan terhubung dengan program serta indikator kinerja. Ketiga, apakah hasil evaluasi menghasilkan perbaikan pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk menilai keberlanjutan dan kelayakan perluasan SI-RISET.

4.5 Catatan Akhir dan Keterbatasan Kajian

Rekomendasi SI-RISET disusun berdasarkan analisis masalah, kesenjangan tata kelola, akar masalah, dan perbandingan alternatif kebijakan. Kebijakan ini menawarkan kerangka operasional untuk memperkuat keterhubungan antara riset, perencanaan, dan evaluasi kinerja di BAPPERIDA Kabupaten Sukabumi. Meskipun demikian, rancangan ini masih memerlukan validasi melalui pembahasan dengan pemangku kepentingan, pemeriksaan kesiapan data dan teknologi, serta penilaian kebutuhan sumber daya. Kajian ini belum

membuktikan secara empiris bahwa penerapan SI-RASET akan secara langsung meningkatkan kualitas seluruh dokumen perencanaan atau capaian pembangunan daerah. Hasil implementasi akan dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kualitas bukti, kemampuan aparatur, konsistensi perangkat daerah, dan keberlanjutan tindak lanjut rekomendasi. Oleh karena itu, implementasi perlu dimulai melalui uji coba yang terukur dan dievaluasi sebelum diperluas. Hasil uji coba selanjutnya digunakan untuk menyempurnakan SOP, memperbaiki integrasi data, dan menyesuaikan indikator keberhasilan. Dengan pendekatan tersebut, SI-RASET diharapkan menjadi arsitektur tata kelola yang membantu BAPPERIDA mengubah hasil riset menjadi dasar pengambilan keputusan dan memperkuat proses pembelajaran kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya riset kebijakan dalam pembuatan kebijakan publik unggul di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p37-46>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (6th ed.). CQ Press.
- Dam, J. L., Nagorka-Smith, P., Waddell, A., Wright, A., Bos, J. J., & Bragge, P. (2023). Research evidence use in local government-led public health interventions: A systematic review. *Health Research Policy and Systems*, 21, Article 67. <https://doi.org/10.1186/s12961-023-01009-2>
- Head, B. W. (2008). Three lenses of evidence-based policy. *Australian Journal of Public Administration*, 67(1), 1–11. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x>
- Head, B. W. (2016). Toward more “evidence-informed” policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484. <https://doi.org/10.1111/puar.12475>
- Howlett, M. (2009). Policy analytical capacity and evidence-based policy-making: Lessons from Canada. *Canadian Public Administration*, 52(2), 153–175. <https://doi.org/10.1111/j.1754-7121.2009.00070.1.x>
- Iswanto, D. (2023). Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026 dalam perspektif evidence based policy. *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(2), 167–178. <https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.134>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (ECOS-PRENEURS)

Published by: PT Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 3025-034X

Volume: 4 Nomor: 2 (November: 2026) hal: 104-130

- Newman, J. (2020). Increasing the ability of government agencies to undertake evidence-informed policymaking. *Evidence Base*, 2020(2). <https://doi.org/10.21307/EB-2020-005>
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2024.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2024). Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2024.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2025). Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Sarjiyanto, Tuhana, Sudarsana, Noviani, L., Ismoyowati, D., Istiqomah, N., Setyawan, A., Mafruhah, I., Rinanto, Y., Wirajaya, A. Y., & Perdana, D. N. C. (2024). Penguatan science based policy pada pemanfaatan riset dan inovasi guna mewujudkan daya saing daerah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 179–186. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21517>